

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta yang ditinjau dari faktor aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan belum berjalan dengan optimal. Berikut penjelasan dari aspek-aspek tersebut:

- a. Aspek komunikasi: penyaluran komunikasi (transmisi) melalui media cetak dan media elektronik yaitu faksimile internal perum BULOG, whatsapp, channel berita BULOG, tempo, kompas, surat rekomendasi, twitter dan instagram. Informasi yang disalurkan sudah cukup jelas karena belum ada sanggahan atau nota keberatan dari berbagai pihak. Konsistensi penyaluran informasi dalam publikasi melalui media cetak maupun elektronik belum optimal, walaupun dilaksanakan secara berkala setiap minggu dan menyampaikan laporan pelaksanaan KPSH BM dengan menggunakan CBP secara berkala paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari bulan berjalan kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- b. Aspek sumberdaya: staff pada perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta masih kurang dari jumlahnya tetapi semuanya sudah memiliki kualitas yang memadai. Informasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan ini belum optimal. Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta memiliki kewenangan menerbitkan penyaluran atau *sales order*, menugaskan gudang untuk mengeluarkan beras KPSH atas dasar pembayaran dan menetapkan distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG. Dinas PPKUKM mempunyai kewenangan melakukan monitoring terhadap harga kebutuhan pokok tidak hanya beras saja ke pasar khususnya cipinang pd pasar jaya. Kewenangan food station yaitu

memantau beras di wilayah DKI Jakarta, mendata downline dan melakukan kontrol proses distribusi. Fasilitas yang disediakan Perum BULOG Pusat berupa sistem informasi terkait produksi dan perkembangan harga yang digunakan untuk menjaga stok digudang sedangkan pada BULOG kanwil DKI Jakarta menyediakan fasilitas kompleks pergudangan. Selain itu, dalam melaksanakan penugasan pengadaan stok CBP perum BULOG menggunakan fasilitas perbankan dengan menggunakan bunga komersil, namun pembayaran tagihan penyaluran stok CBP untuk KPSH sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada peningkatan beban biaya bunga yang harus ditanggung perum bulog.

- c. Aspek disposisi: komitmen Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta melakukan penyaluran, monitoring, dan evaluasi terkait efektivitas KPSH secara acak ke distributor maupun ritel sudah terimplementasi dengan baik. Namun, kendala yang dihadapi adalah komitmen pelaksana eksternal atau pedagang yang kurang mendukung yaitu tidak memasang *price tag* atau spanduk, dan mencampur beras dengan menjual dengan harga premium.
- d. Aspek struktur birokrasi: pelaksanaan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang tertuang pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-05/DP100/04/2022 Tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium belum optimal. Selain itu, Perum BULOG Pusat mendapat tugas KPSH untuk tahun 2022 dengan tanggung jawab harus menjaga stok CBP. Selain itu, Perum BULOG Pusat mendapat tugas KPSH untuk tahun 2022 dengan tanggung jawab harus menjaga stok CBP dan tanggung jawab adalah dari pimpinan wilayah melakukan penerbitan surat penunjukan pada mitra yang memenuhi administrasi. Kendala yang dihadapi adalah penjualan pada tahun 2022 dilakukan secara konsinyasi sehingga terdapat risiko tidak

bayar dan monitoring yang diserahkan ke masing-masing kanwil dan tidak ada satu proses pemantauan secara langsung.

B. Saran

Dalam rangka optimalisasi implementasi kebijakan CBP dalam rangka KPSH maka peneliti menyarankan kepada Pimpinan Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Aspek komunikasi: perlu menambahkan rutinitas publikasi dengan melakukan publikasi minimal seminggu 2 kali di media cetak dan media elektronik.
- b. Aspek sumberdaya: perlu melakukan rotasi, memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui berbagai media cetak maupun elektronik seperti sosialisasi, dialog publik, kerjasama dengan radio dan pemasangan banner di pasar-pasar, data-data yang dimiliki harus mudah diakses dengan menganut SPBE, dan perlu pengkajian SOP terkait reviu yang masih berbelit dan lama.
- c. Aspek disposisi: perlu pengawasan penyaluran untuk memastikan pedagang memasang *price tag*/spanduk dan punishment dengan tidak menjadikan mitra distributor terhadap pelaku kecurangan memutuskan hubungan kerja.
- d. Aspek struktur birokrasi: perlu memperbaiki *Standard Operating Procedures* (SOP) khususnya terkait penjualan kembali dilakukan dengan *cash on carry* dan diperlukan aturan jelas yang mengatur keseragaman monitoring dan evaluasi pada kanwil dengan menyusun pedoman teknis tentang monitoring dan evaluasi terkait hal-hal informasi tentang lokasi penjualan, kuantitas dan harga beras KPSH yang dapat di beli oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Agustino, Leo (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Barlian, Eri (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press.
- Keban, Yeremias T. (2004), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV.
- Suharno (2013), *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul (2014), *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra (1994), *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi (2012), *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.

B. Jurnal, Skripsi, Thesis

- Alfia, Lutfi (2016), *Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 2, No. 3, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

- Anggara, Satria (2014), *Implementasi Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah di Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Fazry, Rachma Waty (2019), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang*, *Dinamika*, Vol. 6 No. 4, Subang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang.
- Jumiati, Hasanatul Rahmi (2020), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan*, *Jurnal Manajemen Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1, Padang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Padang.
- Kurnia, Asyifa Purwanto (2020), *Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional Dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan Guna Mendukung Pertahanan Negara*, *Manajemen Pertahanan*, Vol. 6 No. 1, Bogor: Universitas Pertahanan.
- Kusuma, Dedy AndhiDwi dkk. (2016), *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Jombang*, Tesis, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Magfiroh, Rofiatul dkk. (2021), *Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani*, *Jurnal Respon Publik*, Vol.15 No. 4, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.
- Meigawati Dine, Melawati (2017), *Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi*, *Jispo*, Vol. 7 No. 1, Sukabumi: Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Putri, Anggi Andani (2021), *Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Guna Ketahanan Pangan Pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana.

Kepmendag RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022.

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor PD-05/DP100/04/2022 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium.

D. Dokumen

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB (2022), *Laporan Akhir Kajian Usulan Kebijakan Pangan*, Bogor: IPB University

Utami, Anisa Dwi (2020), *Laporan Kajian Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Mendukung Ketahanan Pangan*, Jakarta: Kemenko Perekonomian.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Jabatan :
Tanggal :

1. Aspek dalam Faktor-Faktor Dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta
 - Komunikasi
 - a. Kepada siapa kebijakan tersebut dikoordinasikan?
 - b. Bagaimana proses koordinasi untuk memastikan pelaksanaan KPSH berjalan efektif dan tepat sasaran?
 - c. Apakah koordinasi telah dilakukan dengan sebaik-baiknya?
 - Sumberdaya
 - a. Apakah jumlah pegawai yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah memadai?
 - b. Bagaimana dengan kualitas pegawai tersebut?
 - c. Dari manakah dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional terkait kebijakan tersebut?
 - d. Apakah dana tersebut telah mencukupi?
 - e. Adakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan ini? Jika ada, sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan?
 - f. Apakah sarana dan prasarana telah mencukupi?
 - Disposisi
 - a. Apakah pegawai yang menangani sudah memiliki komitmen dan dedikasi yang dibutuhkan selama melaksanakan kebijakan tersebut?
 - b. Bagaimana pengawasan terhadap kebijakan ini?
 - Struktur Birokrasi
 - a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut?
 - b. Adakah standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut?
 - c. Adakah pembagian tugas dalam kebijakan tersebut?

PEDOMAN STUDI DOKUMEN

No.	Dokumen	Hasil
1.	Pointers Rapat Koordinasi Penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium (KPSH-BM) tanggal 26 Agustus 2022	-
2.	Kepmendag RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022	-
3.	PD-05/DP100/04/2022 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium	-

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LAMPIRAN 3**TRANSKRIP WAWANCARA**

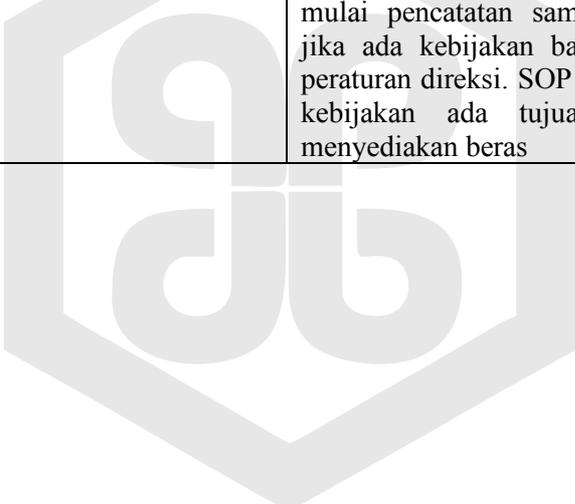
Nama : Epi Sulandari

Jabatan : Kepala Divre Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat

Tanggal : 28 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aspek Komunikasi	
	Bagaimana proses penyaluran komunikasi/transmisi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Mekanisme penyaluran komunikasi dari perum BULOG pusat ke Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta melalui instruksi, begitu BULOG pusat mendapatkan penugasan dari Kementerian Perdagangan, kemudian menginstruksikan Kantor Wilayah dengan menggunakan faksimili dalam negeri biasanya dikerjakan sekali setahun.
2.	Aspek Sumber Daya	
	Apa sajakah fasilitas yang digunakan oleh perum BULOG dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Fasilitas pada Perum BULOG Pusat berupa sistem informasi, kita memberikan kalau semisal ada informasi-informasi produksi dan perkembangan harga karena merupakan bantuan ke kanwil bahwa salah satu tempat stoknya berkurang atau harga tinggi jadi bisa diarahkan kesitu
	Apa sajakah fasilitas anggaran yang digunakan oleh perum BULOG dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Dana penyelenggaraan CBP melalui KPSH yaitu pemerintah gak bayar bulog, tetapi pemerintah menugaskan bulog untuk menyimpan beras sejumlah 1-1,5 Juta ton dengan membeli komersil ada bunga bank ada biaya untuk penyimpanan perawatan atau biaya pergerakan, itu semuanya tidak dibiayai dulu oleh pemerintah jadi meminjam dulu ke bank. Dana CBP saat ini menggunakan dana perbankan komersial tapi semua rupiah akan dihitung oleh BPKP, sehingga akan tahu bahwa setahun ini bulog habis berapa triliun untuk mengelola CBP. Sisa pembelian dan penjualan akan ditagihkan, dan

		sampai sekarang masih dipercaya oleh bank
3.	Aspek Struktur Birokrasi	
	Bagaimana SOP KPSH dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Perum BULOG melaksanakan KPSH mengacu pada Peraturan Direksi sebagai SOP, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan sistem informasi. Begitu dapat penugasan memiliki peraturan internal mulai pencatatan sampai pengeluaran, jika ada kebijakan baru menggunakan peraturan direksi. SOP berisi aktor-aktor kebijakan ada tujuan dan sasaran menyediakan beras



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eko Pranoto

Jabatan : Pimpinan Wilayah Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta

Tanggal : 26 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aspek Komunikasi	
	Bagaimana proses penyaluran komunikasi/transmisi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Penyaluran komunikasi ada 2 yaitu penyaluran internal dan eksternal. Internal: mempublish KPSH secara rutin seperti foto ada di lokasi mana tanggal berapa picnya siapa supaya teridentifikasi dan terpublikasi bahwa memang kegiatan itu ada, di publish di wa grup, instagram dan channel berita bulog. Eksternal melalui instragram dan bekerjasama dengan media seperti tempo dan kompas. Kerjasama melibatkan dinas PPKUKM, satgas pangan, FS.
2.	Aspek Sumberdaya	
	Apa sajakah fasilitas yang digunakan oleh perum BULOG dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Bulog tidak menggunakan uang pemerintah terlebih dahulu tapi menggunakan pinjaman komesial melalui bank
3.	Aspek Disposisi	
	Bagaimana komitmen yang dilakukan dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Secara internal kita diminta untuk memenuhi target penyaluran, ada target yang di perintahkan oleh direktur kanwil. Terkait komitmennya kita melaksanakan itu sesuai perintah direktur melalui faksimile kantor pusat, hanya sesuai dari target penyaluran tapi untuk keamanan kita memerintahkan distributor dan RPK untuk menandatangani surat permohonan menjadi mitra penyalur dan surat memenuhi persyaratan penyaluran KPSH berisi tentang tidak akan menjual diatas HET dan hanya akan menjual untuk keperluan pasar terkait beras medium. Yang terakhir adalah dari pimpinan wilayah melakukan penerbitan surat penunjukan bahwa mitra tersebut setelah

		memenuhi administrasi dia ditunjuk sebagai mitra penyaluran
--	--	---



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Abdillah Luhur

Jabatan : Manager Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta

Tanggal : 2 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aspek Komunikasi	
	Bagaimana proses penyaluran komunikasi/transmisi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Perum BULOG senantiasa memberikan informasi pelaksanaan KPSH melalui media cetak maupun media digital/online. Dapat melalui Twitter: @PerumBULOG, IG: @PerumBULOG dan @bulogbisnis.jakarta
	Bagaimana kejelasan komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Kode etik jurnalisisme yaitu memberitakan seluas-luasnya, selama ini belum ada sanggahan dan belum ada nota keberatan. Masyarakat mengetahui kejelasan informasi dari koneksi Instagram dinas ketahanan pangan, ada kegiatan gabungan, serentak dipublish oleh stakeholder terkait.
	Bagaimana konsistensi terhadap penyampaian komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Setiap minggu ada publikasi kegiatan tersebut, berita tidak setiap hari secara periodik, ketentuan bulog untuk monitoring minimal satu bulan sekali ke penyalur KPSH beras, semisal jual beras tolong spanduknya dipasang dan harga jual dicantumkan supaya masyarakat tahu ini beras yang diperintahkan pemerintah untuk disalurkan untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dan besarnya sudah diatur pemerintah HET nya, terkait spanduk dan publikasi perlu meningkatkan publikasi
2.	Aspek Sumberdaya	
	Apakah sumber daya manusia pada Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta Cadangan Beras	

	Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta mencukupi dan bagaimana kualitasnya?	
	Apakah informasi yang diberikan Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta sudah cukup?	Kita merasa belum optimal karena memang perlu ditingkatkan lagi rutinitas publikasinya di Instagram maupun kerjasama dengan media, karena ada masyarakat yang belum tau apa itu KPSH, padahal pemerintah sudah menginstruksikan kalau punya beras subsidi yang HET nya 9.450.
	Bagaimana wewenang dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Kanwil DKI Jakarta mempunyai gudang karena sebagai kanwil operasional yang menerbitkan penyaluran beda dengan wilayah non operasional yang tidak punya gudang itu akan menginstruksikan ke cabang yang punya gudang. Wewenang dari kanwil terbitkan penyaluran Namanya sales order, gudang perintahkan untuk mengeluarkan atas dasar pembayaran dan kami memiliki wewenang dalam menetapkan distributor
	Apa sajakah fasilitas yang digunakan oleh perum BULOG dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Gudang sebagai penyimpanan komoditi disediakan 77 kompleks pergudangan dan kapasitas total berjumlah 364.000 ton.
3.	Aspek Disposisi	
	Bagaimana komitmen yang dilakukan dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Di peraturan internal, disebutkan agar Perum BULOG wajib melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) KPSH paling sedikit 1 bulan 1x. bentuknya adalah mendatangi saluran KPSH (distributor/ritel), dengan melakukan interview dan dokumentasi foto. Hasil dari monev tersebut yaitu pelaksanaan KPSH belum sempurna, masih banyak dari para pedagang yang tidak memasang spanduk dan <i>price tag</i>
4.	Aspek Struktur Birokrasi	

<p>Bagaimana SOP KPSH dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?</p>	<p>Dari SOP sebagai eksekutor atau operator dilapangan adalah mematuhi SOP walaupun SOP itu ketika dibuat oleh kantor pusat meminta feedback. Kalau tidak darurat secara periodik tapi kalau untuk KPSH kan setiap tahun kebijakannya berubah contohnya pada tahun 2021 itu penjual KPSH adalah cash and carry jadi minim risiko, tetapi di tahun 2022 diperbolehkan konsinyasi jadi mitra boleh ambil dulu baru bayarnya setelah 14 hari maksimal ternyata timbul risiko, barang sudah diambil tapi kalau tidak bayar bagaimana, makanya ada klausul tambahan harus menyerahkan jaminan dalam bentuk liquid atau lainnya, artinya ada bentuk lain disitu, memang kendala-kendala yang dihadapi lebih ke monitoring karena diserahkan ke kreatifitas masing-masing cabang dan masing-masing kanwil tidak ada satu proses pemantauan secara langsung, jadi dikasih tools nya ini kuisisioner kemudian diisi pada saat monitoring lampirkan foto-foto, kita berusaha memenuhi itu karena KPSH merupakan kegiatan yang dipantau terkait subsidi pemerintah.</p>
---	--

POLIT
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ety Syartika

Jabatan : Sekretaris Dinas PPKUKM

Tanggal : 26 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aspek Komunikasi	
	Bagaimana proses penyaluran komunikasi/transmisi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Memang terkait dengan KPSH ada aturan kepmendag RI nomor 3 tentang izin pelaksanaan BM menggunakan beras pemerintah. Dinas Ppkukm Membuatkan surat rekomendasi kepada bulog menuju food station kepada mitra.
	Bagaimana konsistensi terhadap penyampaian komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Kami setiap minggu melakukan koordinasi rutin dinas di pemda dinas teknis di bawah koordinator KPKP yang memonitoring kami.
3.	Aspek Sumberdaya	
	Bagaimana wewenang dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Kami khususnya dinas ppkukm terkait beras medium. Progesnya bergabung dengan tim pengendali, berkoordinasi dengan foodstation. Langkah tim pengendali adalah melakukan monitoring terhadap harga kebutuhan pokok tidak hanya beras saja ke pasar khususnya cipinang pd pasar jaya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Andre Maulana

Jabatan : Direktur Operasional dan Bisnis PT. Food Station

Tanggal : 26 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aspek Sumberdaya	
	Apakah informasi yang diberikan Dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta sudah cukup?	PT Food Station memantau pergerakan harga di pasar induk sehingga warga bisa akses informasi pergerakan stok di situs www.foodstation.id dengan update harga stok jam 8 pagi dan untuk pencatatan stok sudah akurat karena pencatatan digital.
	Bagaimana wewenang dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Food Station sebagai Pengelola PIBC, pasar yang didirikan oleh pak gubernur Ali Shadikin tahun 2004, dan ditunjuk jadi BUMD Pemprov DKI Jakarta, diminta untuk memantau beras di wilayah DKI Jakarta.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Laras Khulsum Ramadhian

Jabatan : Seksi Komersial PT Food Station

Tanggal : 26 Oktober 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aspek Sumberdaya	
	Bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Untuk KPSH itu sifat nya mandiri oleh pedagang. Kendala yang dihadapi, pedagang lambat memberikan data downline sehingga menghambat proses verifikasi.
	Bagaimana wewenang dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Food Station hanya mendata downline nya dan melakukan kontrol proses distribusinya, apakah sesuai dengan downline yang didaftarkan dan apakah sesuai harga yang ditetapkan atau tidak, dan pada akhirnya mengawasi pergerakan harga di PIBC sendiri dan pasar turunan.
2.	Aspek Disposisi	
	Bagaimana komitmen yang dilakukan dalam Rangka Ketersediaan Pasokan Dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta?	Dampak KPSH tidak terlalu signifikan, program KPSH bagus tapi kenapa harga beras tidak turun. Kendala yang di hadapi adanya kecurangan terhadap pencampuran beras KPSH menjadi beras premium. KPSH harus dikontrol agar nanti berasnya tidak dicampur. Jadi yang menerima harus benar-bener UMKM yang pedagang beras, harus difoto kemudian diregistrasi untuk validitas data, dan evaluasi secara berkala.

HASIL STUDI DOKUMEN

No.	Dokumen	Hasil
1.	Pointers Rapat Koordinasi Penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium (KPSH-BM) tanggal 26 Agustus 2022	Perum BULOG dapat menetapkan langsung distributor besar sebagai mitra tanpa usulan instansi daerah setempat dengan ketentuan distributor tersebut memiliki nomor induk berusaha.
2.	Kepmendag RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022	Menteri Perdagangan menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan KPSH BM dengan menggunakan CBP berdasarkan keputusan rakortas tingkat Menteri Bidang Perekonomian.
3.	PD-05/DP100/04/2022 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium	Standar Operasional Prosedur di Perum BULOG terkait KPSH BM

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 1827/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 19 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Penulisan Skripsi
Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta**

Yth. Kepala Perum BULOG Kanwil DKI Jakarta

di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Fauziatul Ifa
NPM : 1931020107
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul Skripsi : *Implementasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi di Perusahaan Bapak. Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa kami dimaksud dalam mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Atas perkenan bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik,

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur;
2. Para Wakil Direktur;
3. Ketua Prodi APN;
4. Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Nomor : B - ~~656~~ /III/09040/11/2022
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Ijin Penelitian

Jakarta, 24 November 2022

Yth. Wakil Direktur I Bidang Akademik
Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II Pejompongan
Jakarta Pusat 10260

Memperhatikan surat dari Saudara/i Nomor 1827/STIA.1.1/PPS.02.3 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa sesuai permohonan atas nama:

No.	Nama	NPM	Program Studi
1.	Fauziatul Ifa	1931020107	Administrasi Publik

Pada prinsipnya permohonan penelitian yang saudara/i ajukan dapat disetujui dan dapat dimulai pada 28 November 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta harus mentaati peraturan di perusahaan.
2. Berpakaian rapi dan menjaga sopan santun di lingkungan Kantor Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten.
3. Data dan dokumen perusahaan **tidak untuk dipublikasikan** selain sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan yang telah diajukan.
4. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Membatasi Mobilitas dan Interaksi).

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Perum BULOG,
Kantor Wilayah Jakarta dan Banten



Dani Satrio
Wakil Pemimpin Wilayah

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Fauziatul Ifa
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 6 April 1997
Alamat Rumah : Perumahan Graha Pancoran Mas BLOK AB 7
Nomor Telepon Genggam : 082311210030
Email : Fauziatulifa4@gmail.com
Status Perkawinan : Sudah Kawin
Riwayat Pendidikan : Diploma I PKN STAN
Nama Instansi : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Alamat Instansi : Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta
Pusat
Nomor Telepon Instansi : (021) 3521885
Jabatan : Pelaksana
Pangkat dan Golongan : II/b
Riwayat Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A